

BAB IV
ANALISA TERHADAP KONSEP KEADILAN
DALAM SERAT KALATIDHA

A. Kelebihan dan Kekurangan Serat Kalatidha

Sebagai pujangga Jawa, karya-karya R. Ng. Rangawarsita tentunya tidak dapat terlepas dari unsur-unsur karakteristik Jawa, termasuk dalam penyusunan *Serat Kalatidha* yang berisi tentang kritik kekecewaan terhadap pemimpin. Nilai-nilai Jawa masih terlihat dalam pesan-pesan yang disampaikan dan seakan-akan menjadi pondasi dasar dalam pemikiran Rangawarsita. Kepatuhan seperti ajaran tentang perlunya memegang teguh norma terlihat dalam istilah *atilar silastuti* dalam *pupuh* 1 yang merupakan penanda terhadap perilaku manusia yang meninggalkan norma atau aturan yang telah berlaku di masyarakat. Akibat dari *atilar silastuti* tersebut maka masyarakat akan mengalami kekacauan. Menjauhkan diri dari sifat egois. Dalam *pupuh* 2 tersebut, penulis melihat kata *Rubeda angrebedi/Beda-beda ardaning wong saknegara* (bahkan kerepotan-kerepotan makin menjadi-jadi/Lain orang lain pikiran). Kata-kata tersebut dapat difahami bahwa *ardaning wong saknegara* adalah mementingkan diri sendiri yang kemudian mengakibatkan terciptanya kondisi *rubeda angrebedi* atau

(keropotan semakin menjadi-jadi). masih terlihat dan menjadi pertanda penghormatan terhadap kaidah nilai-nilai budaya Jawa.¹

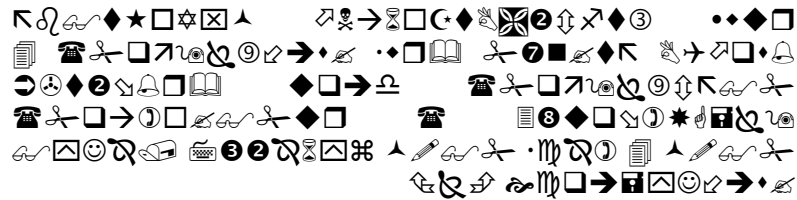
1. Kelebihan *Serat Kalatidha*

Kelebihan yang terdapat pada *Serat Kalatidha* dapat dijabarkan pada beberapa paparan berikut :

a. Mendongkrak hegemoni sistem

Melalui *Serat Kalatidha* dapat tergambar keberanian R. Ng. Ranggawarsita dalam melakukan pembenahan budaya perilaku dalam tatanan Jawa, seperti diketahui bersama bahwasanya perilaku masyarakat Jawa sangat identik dengan posisi dan peran seseorang dalam sebuah masyarakat. Bagi masyarakat yang memiliki strata (tingkat kedudukan) dalam posisi dan peran yang tinggi maka dia secara otomatis juga memiliki kewenangan dan kekuasaan atas strata di bawahnya. Begitu pula sebaliknya manakala seseorang berada pada strata rendah maka ia akan senantiasa berada dalam pengaruh dan wewenang orang yang memiliki strata di atasnya. Hal ini dapat terlihat dan dijabarkan oleh R. Ng. Ranggawarsita dalam menjelaskan hubungan antara Raja dengan bawahannya

¹ Prinsip kerukunan dan prinsip hormat merupakan kaidah dasar yang akan menentukan pola hubungan dalam tatanan masyarakat. Secara lebih jelas lihat Frans Magnis Suseno, *Etika Jawa*, (cetakan keenam), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996).



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu Jadi sebagai penengah keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adilah karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8).⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat jelas relevansi konsep keadilan dalam *Serat Kalatidha* dengan ajaran Islam. Dalam agama Islam juga mengajarkan agar seseorang menjauhi sikap pamrih, karena sikap pamrih hanya akan merugikan diri sendiri. Dalam agama Islam seseorang diwajibkan mempunyai sikap ikhlas dalam melakukan semua kegiatan, termasuk dalam hal ibadah kepada Allah swt. Sikap ikhlas juga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh makhluk di alam raya ini.

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, h. 144

(rakyat). Kondisi normatif.² Ini telah mengantarkan masyarakat pada budaya *ewuh pakewuh* dan *andhap asor* yang begitu kental sehingga melahirkan budaya turunan untuk selalu melaksanakan segala perintah (baik maupun buruk) yang diberikan oleh orang yang berada di strata yang lebih tinggi secara langsung tanpa melalui proses pertimbangan ataupun evaluasi pasca pelaksanaannya.

b. Pemaparan yang kompleks

Pengajaran mengenai konsep keadilan yang harus dimiliki dan dilaksanakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari oleh R. Ng. Ranggawarsita dalam *Serat Kalatidha* dapat dikatakan memiliki sistem tata ajar yang kompleks. Pemaparan tersebut tidak berpatokan hanya pada satu segi saja, seperti halnya diambil dari sudut pandang kewajiban seseorang untuk menegakkan keadilan, namun juga dilengkapi dengan pemaparan tentang sebab dan akibat yang mempengaruhi penegakkan keadilan terhadap diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Paparan yang menjelaskan tentang sebab akibat tersebut akan menjadi “daya tarik” bagi seseorang untuk melaksanakan dan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang ada dalam *Serat Kalatidha*.

² Kondisi normatif dalam masyarakat Jawa yang dapat mempengaruhi kehidupan praktis masyarakat Jawa terdiri dari sikap batin, tindakan yang tepat dalam dunia dan tempat yang tepat.

2. Kekurangan *Serat Kalatidha*

Kekurangan dari *Serat Kalatidha* dapat dijelaskan dalam perbandingan isi serat dengan pembahasan keadilan dalam budaya Jawa dan Islam. Hal ini perlu dilakukan karena R. Ng. Ranggawarsita melakukan penggabungan antara nilai keadilan Islam dan Jawa dalam *Serat Kalatidha*. Secara lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Ketiadaan ajaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara**

Pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai rakyat tidak terbatas pada ketaatan dalam menjalankan perintah, namun juga memupuk perasaan cinta tanah air (kerajaan), sangat diperlukan sebagai sarana penyadaran tentang posisi seseorang dalam pembelaan negara sekaligus sebagai sarana untuk mempersatukan rakyat. Hal ini yang menurut penulis mungkin terlupa/dilupakan oleh R. Ng. Ranggawarsita dalam *Serat Kalatidha*. Menurut penulis, ketiadaan unsur tersebut lebih dikarenakan karena posisi R. Ng. Ranggawarsita sebagai salah satu punggawa kerajaan. Hal ini sangat berpengaruh karena sebagai seorang “pejabat” negara tentu saja R. Ng. Ranggawarsita menganggap bahwasanya masalah yang terkait dengan persoalan keamanan dan kesejahteraan kerajaan adalah wewenang Ratu/Raja, sehingga peran

rendah dan lebih hina. Selain itu kita juga akan terbuka menerima kritikan orang lain terhadap kita. Itu semua karena pengakuan kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan manusia memang tempatnya salah dan lupa. Di sini pula letak urgensi konsep *raja'* dan *khauf* dalam tradisi islam. *Raja'* yakni sikap diri yang selalu berharap akan kemurahan Allah untuk menerima segala amal kita. Di sisi lain kita pun harus mersa khawatir (*khauf*) kalau-kalau Allah belum menerima amal kita, dikarenakan kekurangan kita atau keikhlasan kita yang belum sempurna. Jika pengakuan tersebut tertanam pada setiap muslim pasti akan timbul budaya kehidupan sosial yang kondusif, terwujudnya suatu keadilan bagi semua kalangan, menciptakan ukhuwah islamiyah yang solid dan keharmonisan sosial. Demikianlah implikasi prinsip ikhlas yang sangat diagungkan Islam, karena ikhlas menciptakan kesalehan vertikal antara seorang hamba dengan khaliq-Nya, selain juga mewujudkan kesalehan horizontal antara sesama manusia, begitu luhurnya implikasi positif yang ditimbulkan prinsip keikhlasan.

Dalam ajaran Islam memberikan perhatian yang besar bagi pentingnya “ibadah sosial”, Islam menganjurkan pemeluknya agar mampu berlaku adil, baik terhadap kaum golongannya maupun musuh-musuhnya. Al-Qur'an memberikan doktrin pada setiap umat Islam untuk berlaku adil hal itu terdapat dalam QS al-Maidah ayat 8:



tidak akan pernah menerima amal tersebut sekalipun jumlahnya banyak. Allah Swt berfirman dalam surat Al-a'raaf ayat 29:



Artinya : *Katakanlah, “Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap shalat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula. (Al-A’raaf: 29).⁷*

Dalam surat Al-a'raaf ayat 29 tersebut terdapat penegasan ditolaknya segala bentuk kesyirikan, jika seseorang mampu menjauhkan diri dari kesyirikan tersebut maka akan terwujud keadilan yang telah diperintahkan oleh Allah Swt.

Proses pengejawantahan agung yang tersirat dalam sikap keikhlasan, pada tataran individu akan membentuk sikap toleran dan suka memaafkan serta menghargai orang lain. Kekurangan yang ada dalam diri ketika berhubungan dengan Allah, akan membuat kita tidak merasa lebih benar, tidak tinggi hati, dan tidak sombong, namun, akan membuat kita rendah hati dan toleran terhadap orang lain. Hasilnya kita akan mudah memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menganggap orang lain lebih

rakyat (jelata) tidak begitu atau bahkan tidak sama sekali diperhatikan.

b. Ketiadaan ajaran keadilan terhadap alam lingkungan

Ditinjau dari keadilan dalam Islam,³ salah satu kekurangan yang terdapat dalam *Serat Kalatidha* adalah ketiadaan pembahasan yang terkait dengan perilaku manusia terhadap lingkungannya. Hal ini penulis anggap sebagai kekurangan, karena keadilan terhadap lingkungan hidup memiliki nilai yang sangat krusial bagi kehidupan manusia, tanpa mengajarkan kewajiban manusia terhadap keadilan lingkungan bisa jadi manusia malah menjadi perusak bagi lingkungan hidupnya sendiri sehingga akhirnya akan menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia.

c. Ketiadaan ajaran Keadilan terhadap Diri Sendiri

Kekurangan *Serat Kalatidha* berikutnya adalah kurang mengeksplorasi keadilan terhadap diri sendiri. Jika dikaji secara mendalam, perilaku terhadap diri sendiri yang diajarkan dalam *Serat Kalatidha* lebih bersifat represif (menghambat), yakni usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Asumsi ini dapat dibuktikan dengan ajaran-ajaran tentang

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, departemen Agama, (Surabaya: Terbit Terang, 2002), h. 206

³ Keadilan dalam Islam terwujud ke dalam empat jenis keadilan, yakni keadilan terhadap Tuhan, keadilan terhadap diri sendiri, keadilan terhadap sesama manusia (makhluk), dan keadilan terhadap lingkungan.

perlu nya manusia menata perkataan dan perbuatannya sehingga tercipta harmonisasi dalam masyarakat, sedangkan perilaku-perilaku yang bersifat sosial terhadap orang lain tidak dijabarkan dalam *Serat Kalatidha* seperti halnya perilaku memberikan maaf.

B. Relevansi Konsep Keadilan Dalam *Serat Kalatidha* dengan Kondisi Sekarang

Keadilan merupakan salah satu ajaran pokok Islam yang terlupakan dalam hidup dan kehidupan. Keadilan merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang banyak dilecehkan oleh para pemeluk Islam sendiri. Banyak orang yang mengaku Islam, namun masih tetap saja berbuat kedhaliman. Banyak orang yang mengaku Islam tetapi melakukan perbuatan-perbuatan keji, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme tetap saja dilakukan. Banyak hakim yang berasal dari kalangan Islam tetapi jual beli keadilan tetap berlangsung dan malah semakin marak dalam lembaga-lembaga peradilan di negeri ini. Banyak para pejabat publik di negara kita ini yang berasal dari kalangan agama Islam tapi mengapa rasa keadilan terasa begitu jauh dalam hidup dan kehidupan. Banyak konglomerat yang berasal dari kalangan Islam tetapi mengapa banyak terjadi kekisruhan, tindakan perampasan tanah dan pengusuran terus terjadi dalam perluasan wilayah imperium bisnis dan monopoli perekonomian.

Banyak pengusaha yang berasal dari kalangan muslim tetapi mengapa banyak hak dari para karyawan yang tidak

C. Relevansi Konsep Keadilan dalam *Serat Kalatidha* dengan Ajaran Islam

Dalam *Serat Kalatidha* R. Ng. Ranggawarsita menyatakan bahwa keadilan hanya dapat terwujud jika setiap individu menjauhkan diri dari sikap *pamrih* pribadi. Pada umumnya *pamrih* pribadi akan menjerumuskan seseorang pada kejahatan yang justru menggagalkan cita-cita luhur yang diupayakannya. Munculnya *pamrih* pribadi pada seseorang mendorong seseorang mendorong seseorang melakukan perbuatan fitnah demi kepentingan pribadi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kolusi yang menutup ruang bagi terciptanya keadilan.⁶

Sikap *pamrih* artinya menginginkan keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri. Dalam ajaran Islam lawan dari sikap *pamrih* yaitu sikap ikhlas. Ikhlas artinya melakukan ibadah hanya mengharap balasan dan ridha dari Allah semata, tidak disertai *riya'* maupun *sum'ah*, tanpa mengharapkan *pamrih*. Jika sebuah amal dikerjakan tanpa ada keikhlasan, maka akan merugikan diri sendiri. Ikhlas merupakan perkara penting dalam kehidupan seorang Muslim yang menjadi penentu dan syarat diterimanya amal. Allah Swt tidak akan menerima amal apapun kecuali jika amal tersebut merupakan amal shalih yang dikerjakan dengan tulus dan ikhlas hanya karena Allah Swt, maka siapapun yang beramal shalih namun tercampur dengan kesyirikan, maka Allah

⁶ Dhanu Priyo Prabowo (et. all), *Pengaruh Islam dalam Karya-karya R. Ng. Ranggawarsita*, (Yogyakarta: NarasiI, 2003), h. 85

benar adil dan memberikan hak dan kewajiban kepada semua rakyatnya.

Jika pemimpin suatu negara tidak memiliki jiwa adil dan taqwa maka roda pemerintahan tidak akan mempunyai visi dan misi yang jelas. Pada akhirnya akan membawa negara tersebut ke dalam krisis multidimensi yang akhirnya masuk jurang kehancuran, karena pemimpin akan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan dan hajat umum rakyatnya. Pemimpin tersebut akan mengambil hak-hak rakyatnya dan memimpin secara asal-asalan. Lain halnya jika pemimpin mempunyai jiwa adil dan taqwa maka pemimpin tersebut akan membawa negara menuju kesejahteraan dan kemakuran bagi seluruh rakyatnya. Pemimpin tersebut akan lebih mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan dirinya sendiri, bahkan pemimpin tersebut akan berani menanggung derita yang dialami oleh rakyatnya.

Dalam hal ini jelas bahwa konsep keadilan R. Ng. Ranggawarsita serta relevansinya dengan zaman sekarang ini perlu dipertegas lagi bahwa keadilan tersebut harus dimiliki oleh setiap orang terutama seorang pemimpin yang mengatur sebuah negara. Perkembangan dan kemajuan zaman sedikit banyak telah berpengaruh pada perubahan cara pandang dan budaya masyarakat. Nilai-nilai luhur budaya yang diwariskan oleh leluhur seakan tergantikan dengan kemajuan teknologi.

diberikan, kerja diharuskan tepat waktu, dan kuota produksi harus mencapai target, tetapi mengapa gaji karyawan masih dibawah UMR, banyak aparat keamanan (TNI/ POLRI) yang berasal dari kalangan Islam, tetapi mengapa kekisruhan, tindak kekerasan dan tindak semena-mena masih saja sering dilakukan.

Dalam realitas kehidupan nasional kita, keinginan beberapa wilayah untuk memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam satu sisi juga dilatarbelakangi oleh ketidakadilan yang mereka rasakan selama ini yaitu arogansi pusat yang berlebihan terhadap daerah. Kekayaan alam di daerah dikeruk oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah sendiri selaku pemilik aset, justru tidak mendapatkan bagian yang layak untuk kekayaan yang mereka miliki. Pembangunan daerah tidak diperhatikan sarana dan prasarana umum daerah tidak diperbaiki, bahkan tenaga kerja lokal dari sekitar daerah dimana sumber kekayaan alam itu berada tidak diprioritaskan. Ini jelas merupakan sebuah ketidakadilan yang nyata, bahkan konflik antar etnik, antar agama dan antar kelompok tertentu dalam masyarakat di beberapa wilayah negara yang kita cintai ini dalam satu sisi juga dilatarbelakangi oleh ketidakadilan yang dirasakan oleh salah satu kelompok. Hukum tidak ditetapkan secara sama untuk golongan mereka, hukum tidak tegas terhadap kelompok pejabat, sementara terhadap kelompok rakyat jelata hukum sangat ditegakkan.

Manusia secara hakiki merupakan makhluk konflik. Dari kemampuannya untuk menangani konflik-konfliknya tergantung survival-nya umat manusia. Manusia itu makhluk berkonflik merupakan implikasi hakiki kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk alami dan makhluk sosial, sebagai makhluk alami manusia hidup dalam pertukaran zat terus menerus dengan alam, sedangkan sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain serta dibutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mengembangkan diri, karena ketergantungan dari satu dunia alami yang terbatas maupun karena ketergantungannya dari komunikasi dengan orang lain dapat terjadi pertentangan. Kenyataan itu yang dimaksud dengan pernyataan bahwa manusia merupakan makhluk berkonflik.⁴

Seperti itulah gambaran singkat realitas kehidupan kita sekarang. Semua itu terjadi karena keadilan hanyalah sebatas retorika serta sekedar ucapan yang manis dan fasih di bibir, namun nihil dalam pelaksanaannya. Semua itu terjadi lantaran keadilan hanyalah ditegakkan setengah hati bukan sebenarnya. Padahal jika prinsip keadilan itu diterapkan untuk seluruh lapisan masyarakat, niscaya akan terwujud ketentraman dan kedamaian dalam hidup dan kehidupan.

Untuk semua masalah itu hendaklah nilai-nilai keadilan ditegakkan untuk semua kelompok, golongan dan lapisan agar

tercipta kedamaian di bumi pertiwi dan juga seluruh dunia. Keadilan adalah prasyarat utama bagi terwujudnya kebahagiaan, perdamaian, dan kedamaian dunia.⁵ Sebenarnya keadilan bukanlah sesuatu yang baru. Persoalan keadilan itu telah hadir sejak manusia mengenal baik dan buruk.

Untuk menghilangkan rasa ketidakadilan tersebut, R. Ng. Ranggawarsita mencoba memformulasikan suatu standar keadilan yang mengandung nilai-nilai Islam. Keadilan memang harus dimiliki oleh setiap orang, karena pada intinya keadilan itu harus diterapkan terlebih dahulu terhadap dirinya sendiri. Bagaimana seseorang akan mampu berbuat adil kepada orang lain, kalau terhadap dirinya sendiri saja selalu berbuat *dhalim*.

Lebih lanjut Ranggawarsita mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mampu bersikap amanah demi terciptanya suatu keadilan. Jika seorang pemimpin tidak mampu bersikap amanah maka negara akan menjadi rusak. Pemimpin atau abdi negara harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap rakyat, memiliki kemampuan mengamankan, amanah dalam bekerja, penuh pengabdian dan menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Pemimpin juga harus memiliki sikap yang adil. Pemimpin yang adil akan berupaya menghapuskan segala bentuk penindasan dan berdiri di belakang orang yang memegang syariat agama dalam rangka menegakkan keadilan. Seorang pemimpin harus benar-

⁴ Franz Magnis Suseno, *Berfilsafat Dari Kontek*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1992), h. 200

⁵ Mawardi labay El-Sulthani. *op. cit.* h. 5